

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. REVIEW PENELITIAN TERDAHULU

Adelina (2013), meneliti tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menyatakan pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik telah menunjukkan angka yang sangat efektif dengan rata-rata 104,28%. Kemudian, kontribusi untuk pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah dalam Kabupaten Gresik agak kurang dengan rata-rata 5,43%, sehingga kontribusi pajak bumi dan bangunan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB dengan memberikan pengaruh dan penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah. Metode yang digunakan pada penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode untuk menggambarkan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan penerimaan serta berkontribusi Pajak Bumi dan Bangunan penerimaan pendapatan daerah dalam Kabupaten Gresik pada tahun 2007 hingga 2011.

Pratiwi (2014), meneliti tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 kurang efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, terjadinya kesalahan administrasi dalam penetapan objek pajak, masih ada wajib pajak yang belum membayar pajak terutang, faktor perekonomian masyarakat yang kurang/tidak mampu membayar pajak, dinamika perubahan atau peralihan hak atas tanah/bangunan yang cepat, kurangnya SDM. Adapun upaya pemerintah daerah untuk mengatasi hal adalah melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak, mendata objek pajak secara langsung, pemberian keringanan pajak, pemberian sanksi dan denda administrasi, pemurnian basis data secara rutin, merekrut tenaga adidaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Polii (2014), meneliti tentang efektivitas dan pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di Kota Manado. Hasil penelitian menyajikan bahwa secara keseluruhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran 2008 di kota Manado sudah efektif meski mengalami fluktuasi jika dilihat dari tahun 2008-2012. Dengan kata lain, kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado semakin membaik. Jadi dapat

dikemukakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB yang semakin baik akan memberikan pendapatan daerah yang baik pula. Penyebab penerimaan PBB mengalami fluktuasi dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kurang pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, terkadang juga ada keperluan mendesak sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak harus terpakai untuk biaya keperluan tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

Pertiwi, dkk (2014), meneliti tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Probolinggo. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Probolinggo secara keseluruhan kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan terendah pada tahun 2010 dengan tingkat efektivitasnya 72,12% termasuk kriteria kurang efektif. Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2013 dengan tingkat efektivitasnya 83,48% termasuk kriteria cukup efektif. Kenaikan penerimaan PBB pada tahun 2013 dikarenakan pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB secara keseluruhan sebesar 78,32% dengan kriteria kurang efektif. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam optimalisasi pemungutan PBB di Kota Probolinggo adalah meningkatkan kompetensi petugas/ pegawai, meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai, meningkatkan sarana dan prasarana

operasional, meningkatkan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan profesional kinerja pegawai, meningkatkan sosialisasi tentang pajak kepada Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti untuk mendapatkan data yang objektif.

Nurmalasari (2014), meneliti tentang efektivitas dan kontribusi proses pelayanan pengalihan pengelolaan serta pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Mataram. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2009–2013 mengalami peningkatan dan telah memenuhi kriteria efektivitas. Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 antara lain: melakukan pendataan ulang Wajib Pajak, melaksanakan penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan atas Surat Tagihan Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, membuat surat himbauan Wajib Pajak untuk segera memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, mempermudah wajib pajak melalui pelayanan dimana bekerjasama dengan Bank Nusa Tenggara Barat (NTB), menyediakan mobil keliling yang terjadwal di setiap lingkungan yang berada di Kota Mataram agar lebih mempermudah wajib pajak untuk membayar Pajak bumi dan bangunan serta menyelenggarakan

undian berhadiah (gebyar PBB) untuk pembayaran PBB secara tepat waktu. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif.

Pradita, dkk (2014), meneliti tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta kontribusinya terhadap PAD Kota Surabaya. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pemungutan PBB di Kota Surabaya termasuk dalam katagori cukup efektif. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya antara lain: melaksanakan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB Perkotaan. Beberapa kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang telah dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya diantaranya adalah pemeliharaan dan perbaikan basis data PBB Perkotaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan objek pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi, dan mobil keliling. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya setiap tahunnya untuk mengoptimalkan penerimaan realisasi PBB Perkotaan dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data dan fakta yang dihimpun selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk kata dan gambar untuk meberi penjelasan dan pemahaman.

Hermansyah (2015), meneliti tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Kota

Makassar. Hasil penelitian menyajikan bahwa rata-rata dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan cukup efektif yaitu 83,41% dari jumlah keseluruhan yang diperoleh setiap kecamatan di kota Makassar. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait mengefesienkan pemungutan pajak untuk daerah Makassar khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti melakukan kerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam proses pendaftaran dan penyeteroran SPT dan disetorkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah serta Dinas Pendapatan Daerah yang memberikan pegawai ke setiap kecamatan untuk memonitoring semua yang terjadi disetiap kecamatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur yang telah melakukan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini juga menganalisis hambatan apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyuwangi, serta menggambarkan upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyuwangi.

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah, namun dalam penelitian ini tidak membahas tentang kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini lebih difokuskan pada seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. PAJAK

#### a. PENGERTIAN PAJAK

Pengertian dan penjelasan pajak dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- 1) Soemitro (dalam Resmi 2013:1), menjelaskan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
- 2) Djajadiningrat (dalam Resmi 2013:1), mengungkapkan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- 3) Feldmann (dalam Resmi 2013:1), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- 4) Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 5) Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas adalah sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
  - b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  - c) Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- b. FUNGSI PAJAK

Menurut Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi *Regularend* (Pengatur).

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembagunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi peraturan, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi peraturan adalah:

### a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tariff pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.

### b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan:

dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberi kontribusi yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

### c) Tarif ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha

terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### c. HUKUM PAJAK

Berdasarkan Sutedi (2011), hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

##### 1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwahukum yang harus dikenakan

pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Undang-Undang pajak yang termasuk dalam hukum pajak materiil untuk Pajak Pusat adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
  - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- Contoh materiil untuk Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Daerah Provinsi
  - 1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

- 2) Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 37 Tahun 2012  
Tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan  
Pajak Air Permukaan.

b) Pajak Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun  
2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
Perkotaan.
- 2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang  
Pajak Hotel.
- 3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012  
Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- 4) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- 5) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2010  
Tentang Pajak Hiburan.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, cara-cara penyidikan,

macam-macam sanksi, dan lain-lain. Undang-Undang yang termasuk hukum formal adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang ini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

d. JENIS PAJAK

Berdasarkan Resmi (2013:7-8), terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

- 1) Menurut golongannya pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - a) Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pada pihak ketiga. Pengenaannya tidak secara periodik tetapi dikenakan jika terjadi hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut sifatnya Pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjek pajaknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Pusat / Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten-kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, PBB, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

e. TATA CARA DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Resmi (2013:8-11) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a) Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan



kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pengenaan oajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

c) Stelsel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Dan begitu pula sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

f. **TARIF PAJAK**

Menurut Resmi (2013:14-16), untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proposional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif regresif (menurun).

1) **Tarif Tetap**

Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

2) **Tarif Proporsional (Sebanding)**

Tarif Proporsional (Sebanding) adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

### 3) Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif (Meningkat) adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

### 4) Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif (Menurun) adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

## 2. PAJAK DAERAH

### a. PENGERTIAN PAJAK DAERAH

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. JENIS PAJAK DAERAH

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jenis Pajak Daerah antara lain:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri dari:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan; dan
  - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari
  - a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Parkir;
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 3. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

#### a. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berperan penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan kemandirian Daerah.

#### b. SUBJEK DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat

olahraga; galangan kapal, dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

c. **DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
- 2) Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 % ( nol koma dua persen) per tahun.

Adapun contoh perhitungan untuk menentukan PBB-P2 terutang sebagai berikut:



Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Wajib pajak A mempunyai obyek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 300.000.000,-/m<sup>2</sup>
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 350.000.000,-/m<sup>2</sup>
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 50.000.000,-/m<sup>2</sup>
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000.00,-/m<sup>2</sup>

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi :  $800 \times \text{Rp.}300.000,- = \text{Rp.} 240.000.000,00$

2. NJOP Bangunan :

a. Rumah dan garasi

$400 \times \text{Rp.} 350.000,00 = \text{Rp.} 140.000.000,00$

b. Taman  $200 \times \text{Rp.} 50.000,00 = \text{Rp.} 10.000.000,00$

c. Pagar  $(120 \times 1,5) \times \text{Rp.} 175.000,00 = \underline{\text{Rp.} 31.500.000,00 +}$

Total NJOP Bangunan Rp. 181.500.00,00

Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp. 421.000.00,00

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak =Rp. 10.000.000,00-

3. Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00

4. Tarif Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0, 1 %

5. Pajak Bumi dan Bangunan Terutang :

$0, 1 \% \times \text{Rp.} 411.500.000,00 = \text{Rp.} 411.500,00$

#### d. TATA CARA PEMUNGUTAN

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan tata cara pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- 3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- 5) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - SKPDKB dalam hal:
    - a) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - b) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- c) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 6) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 8) Kenaikan tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 9) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

e. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Daerah sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- 5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. **KEBERATAN DAN BANDING**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan keberatan dan banding sebagai berikut

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a) SPPT;
  - b) SKPD;
  - c) SKPDKB;
  - d) SKPDKBT;
  - e) SKPDLB;
  - f) SKPDN; dan
  - g) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan

- 4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- 5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- 6) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 7) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- 8) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- 9) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### 4. EFEKTIVITAS

##### a. PENGERTIAN EFEKTIVITAS

Pengertian dan penjelasan teori efektivitas dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
- 2) Mahmudi (2005:92), efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif satu program atau kegiatan.
- 3) Handyaningrat (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 4) Halim (2004:166) mendefinisikan Efektivitas merupakan keadaan yang terjadi akibat atas yang dikehendaki. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$Efektivitas\ PBB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ PBB} \times 100\%$$

Sumber : Abdul Halim (2001 :164)

- 5) Menurut Mardiasmo (2009:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

#### b. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG EFEKTIVITAS

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya meningkatkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan dicapai apabila segala kegiatannya berjalan efektif. Mewujudkan kegiatan yang efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Faktor-faktor pendukung efektivitas menurut Steers (1985:209-211) yaitu:

- 1) Ciri Organisasi dalam suatu organisasi dapat dilihat dari struktur dan teknologi organisasi yang mempunyai segi-segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur dapat



ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formasi

Teknologi yang ada dalam organisasi juga dapat berpengaruh atas tingkat efektivitas, walaupun tidak secara langsung. Bukti-bukti menunjukkan bahwa penggunaan variasi teknologi berinteraksi dengan struktur organisasi dan penggunaan teknologi. Jika struktur dan teknologi digabungkan maka para pegawai akan menghadapi masalah-masalah dengan mudah sehingga usaha untuk mencapai tujuan dapat diwujudkan.

- 2) Lingkungan → Disamping organisasi, lingkungan dalam pencapaian efektivitas mempunyai pengaruh yang sangat besar. Keberhasilan hubungan organisasi dan lingkungan bergantung pada tiga hal yaitu: (1) keadaan lingkungan, (2) ketetapan persepsi, (3) tingkat rasionalitas.

Ketiga faktor tersebut berpengaruh kepada organisasi terhadap perubahan lingkungan. Semakin tepat tanggapannya, semakin berhasil adaptasinya yang dilakukan oleh organisasi.

- 3) Pekerja dan Pegawai merupakan faktor yang berpengaruh yang ketiga atau efektivitas adalah para pekerjaan atau pegawai itu sendiri. Faktor pekerja berpengaruh terhadap efektivitas karena

perilaku pekerjalah dalam jangka panjang akan memperlancar atau menghambat tercapainya tujuan organisasi.

Kesadaran akan sifat perbedaan pegawai yang terdapat diantara pegawai sangat penting, karena pegawai yang berbeda akan memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula. Pentingnya mengetahui perbedaan pegawai maka organisasi dapat menyesuaikan kemampuan dan kepribadian para pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan roda pemerintahan. Kinerja aparatur yang efektif akan menambah rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga pelayanan publik yang dilakukan pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan rakyat.

#### c. KRITERIA EFEKTIVITAS

Efektivitas erat kaitanya dengan sebuah organisasi. Organisasi dalam mencapai tujuannya berdasarkan kepada langkah-langkah atau program yang telah ditentukan. Program tersebut dapat dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Antara penyusunan program kepada pencapaian visi dan misi dapat dikatakan efektif, apabila telah sesuai dengan kriteria dari efektivitas. Efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat diwujudkan apabila ada beberapa indikator sebagai ukuran efektivitas. Sedarmayanti (1995:61), menyatakan bahwa untuk

efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu:

- 1) Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.
- 2) Proses → efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.
- 3) Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (Input) dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.
- 4) Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Produktivitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran atau kriteria efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta

menunjukkan pada tingkatan sejauhmana sebuah organisasi, program, kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (dalam Adelina,2013) rumus yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas PBB ialah dengan jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi dengan target penerimaan PBB dikali 100%. Sebagai pedoman untuk menilai interpretasi efektivitas adalah jika lebih dari 100% maka dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100% dapat dikatakan efektif, 80% - 90% dapat dikatakan cukup efektif, 60% - 80% dapat dikatakan kurang efektif, jika kurang dari 60% maka tidak efektif.